

# **Tribalisme, Oligarki Kekuasaan dan Dinamika Politik Kekkerabatan Dalam Jaringan Pondok Pesantren**

**Nurul Azizah**

Universitas Ibrahimy Situbondo  
nurulazizah@ibrahimiy.ac.id

## **Abstract**

Religious elites have an important role in the democratic system in Indonesia. The involvement of chairmen of Islamic boarding schools (pondok pesantren) in local elections in the context of local dynamics has spawned a network of oligarchic power and dynastic politics. There is an assumption that the participation of the elite of Islamic boarding schools in local politics is considered to be inevitable to the democratic process with the spread of corruption cases, and political nepotism. Actors in dynastic politics use famous figures from the pesantren's family as a political tool to gain power. Power relations and patron-client relationships in Islamic boarding schools provide great benefits to ensure a candidate is elected in a local election. The purpose of this paper is to analyze the relation between power, oligarchy, and the politics of kinship of the elite boarding school in the dynamics of local politics. This article shows that dynastic politics undermined the pillars of Indonesian democracy. Factors that cause oligarchy in pondok pesantren are populism, power network, and tribalism. These factors are inseparable from the influence of patronage, the power of local elites, and the effort of the elite to build dynastic politics. This article suggests that religious elites within the circle of political dynasties are expected to work professionally, not merely using the pesantren family..

**Keywords:** oligarki, pesantren, jaringan kuasa, tribalisme, politik lokal

## Pendahuluan

Oligarki kekuasaan dan politik dinasti merupakan fenomena pemilihan kepala daerah langsung pasca reformasi. Menjadi strategi untuk melanggengkan kekuasaan, meruntuhkan proses demokrasi di Indonesia. Demokratisasi melahirkan elit menjadi penguasa-penguasa lokal.<sup>1</sup> Elit agama dari pondok pesantren menjadi bagian dari dinasti politik di Indonesia. Politik kekerabatan pondok pesantren mengukuhkan kekuatan dominasi kiai diranah politik lokal. Relasi kekeluargaan dari keturunan, kerabat, santri dan simpatisan fanatis pesantren.<sup>2</sup> Di Jawa Timur sangat nampak kuatnya dominasi Kiai mempengaruhi jaringan patron klien. Kuat dan lemahnya pengaruh relasi kuasa kiai dan elit lokal ini terkait dengan transformasi peran sosial dari elit lokal ini menjadi raja kecil di politik lokal di Jawa.<sup>3</sup>

Sejauh ini yang membahas tentang oligarki kekuasaan dan politik dinasti pada pondok pesantren. Relasi kekuasaan kiai juga diteliti oleh Chalik, hasil temuannya adalah ulama lebih powerful daripada umara' faktor ini terjadi karena adanya keterikatan hubungan patron klien antar keduanya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Asep Muslim terdapat dua faktor yang mempengaruhi peran politik elit yang pertama kebijakan politik pemerintah pusat, yang kedua aspek sosial-budaya dimasyarakat. Adanya politik dinasti di Pandeglang Banten menyebabkan dampak buruk demokrasi seperti kasus korupsi, buruknya layanan publik, kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi dan ada kelompok-kelompok yang dimarginalkan.<sup>5</sup> Senada penelitian politik familisme oleh Djati dan Sutisna menjelaskan bahwa politik dinasti di pengaruhi basis keluarga. Relasi familisme sudah menjadi fenomena di Indonesia. Kiai mampu mempengaruhi karir politik anak-anak dan keluarganya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Nor Hasan, "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara," *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 260, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>.

<sup>2</sup> S Harjanto, "Pemilu, Politik Patronase Dan Ideologi Parpol," *None* 1, no. 2 (2012): 81-102, <https://doi.org/10.33558/akp.v1i2.593>.

<sup>3</sup> M. Imam Zamroni, "Agama, Etnis dan Politik Dalam Panggung Kekuasaan: Dinamika Politik Tauke Dan Kiai Di Madura," *el-Harakah (terakreditasi)* 10, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.18860/el.v10i1.4596>.

<sup>4</sup> Abdul Chalik, "Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur," *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 364, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>.

<sup>5</sup> Asep Muslim et al., "Dinamika Peran Sosial Politik Ulama Dan Jawara Di Pandeglang Banten," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 461, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>.

<sup>6</sup> Agus Sutisna, "Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2017, <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>; Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2015, <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>.

Tujuan Penelitian ini untuk melengkapi kekuarangan studi yang sudah ada dan mengabaikan adanya pengukuhan oligarki kekuasaan politik dinasti pada pondok pesantren di Indonesia. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia tampak bahwa keluarga besar pondok pesantren menguasai posisi strategis kekuasaan buah dari sistem demokrasi seperti pada suksesi pemilu kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Sehubungan dengan itu terdapat tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan: (a) bagaimanakah oligarki kekuasaan berlaku di pulau Jawa,; (b) faktor - faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya oligarki kekuasaan dan dinasti politik di lingkungan pondok pesantren di Jawa dalam konteks dinamika politik lokal; (c) bagaimana oligarki kekuasaan dan politik keluarga mampu mempengaruhi gerakan sosial dan demokratisasi di ranah lokal. Ketiga rumusan masalah ini penting diajukan, melihat fenomena yang ada semakin meluasnya politik dinasti pondok pesantren yang mengandalkan pengaruh elit agama pada pemilu di Indonesia. Pada waktu yang sama perlu kajian secara mendalam tentang implikasi dari oligarki kekuasaan pondok pesantren terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa Power Elite Theory merupakan hubungan antara tiga kelompok yakni; politik, militer dan ekonomi merupakan penentu terhadap kebijakan -kebijakan penting. Power elite theory ini adalah hasil temuan penelitian Mills.<sup>7</sup> Gerakan sosial politik elit agama; relasi kuasa tidak bisa lepas dari peran aktor yang paling berkuasa seperti dominasi elite agama atau kiai. Patron - klien : dalam teori patron-klien scott membeikan pemaparan bahwa relasi keterikatan dan ketidakberdayaan klien terhadap kuasa patronase sehingga hubungan tersebut menjadi abadi karena ketidakmampuan klien melepaskan diri dari kondisi yang ada.<sup>8</sup>

## Metode

Permasalahan oligarki kekuasaan dan politik dinasti pondok pesantren dipilih menjadi objek penelitian ini mengingat implementasi elit pesantren yang menjadi

---

<sup>7</sup> Ahmad Imam Mawardi, "Membaca Konteks Dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan Charles Wright Mills and the Power Elite Theory: Reading the Context and Mapping the Political Sociology Theory About the Class of Elite Power," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no. 2 (2019): 73-83; David Grusky and C. Wright Mills, "The Power Elite," in *Inequality in the 21st Century*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429499821-16>; Anton Grau and Christoph Houman, "Identifying Power Elites – k-Cores in Heterogeneous Affiliation Networks," *Social Networks* 50 (2017): 55-69, <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.009>.

<sup>8</sup> Luis Roniger, "Patron-Client Relations, Social and Anthropological Study Of," in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12125-7>; James C. Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia," *The Journal of Asian Studies*, 1972, <https://doi.org/10.2307/2053176>.

penguasa ditingkat lokal semakin meluas sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung dan pemilihan legislatif serentak. Seperti yang dijelaskan para ahli bahwa kekuasaan politik dinasti melemahkan proses demokrasi Indonesia, merebaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkaran jaringan keluarga. Hal yang miris terjadi karena pusat kekuasaan oligarki sekarang memasuki dunia elit agama di jaringan pondok pesantren, sehingga sulit membedakan antara ulama dan umara dengan konflik kepentingan.

Pada kajian ini menggunakan penelitian kualitatif prespektif fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui indept interview/ wawancara secara mendalam, melalui observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan saat elit menjadi juru kampanye untuk memenangkan putra putrinya saat bertarung memperebutkan kursi kepala daerah atau menjadi anggota legislative. Sasaran wawancara langsung adalah tokoh-tokoh elit agama selaku pengasuh pondok pesantren yang sekaligus sebagai aktor politik di kancah lokal, mereka merupakan representasi komunitas politik dinasti dalam konteks dinamika politik lokal. Wawancara dilakukan di beberapa tempat antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, baik bertatap langsung atau melakukan wawancara melalui sambungan telepon. Hasil pengumpulan data dilakukan analisis secara deskripsi dan interpretasi baik untuk data wawancara ataupun data dari hasil wawancara.

Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisa data hubbermas dan Milles dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data, memaparkan, mereduksi dan terakhir memverifikasi. Data yang berasal dari hasil wawancara dikolaborasikan dengan data hasil observasi dan pengamatan. Berikutnya data tersebut dipaparkan dan direduksi kembali dengan membuang data yang tidak mendukung kepentingan penelitian. Sebagai tahap akhir melakukan verifikasi data.<sup>9</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Fenomena oligarki kekuasaan Elit Pesantren**

Pesantren hingga saat ini tetap bertahan dan mengikuti perkembangan zaman, adaptif selalu dinamis dengan dunia modern<sup>10</sup>. Sehingga banyak pesantren yang tetap eksis dan mampu bersaing dengan kehidupan kekinian. Salah satu eksistensi elit pesantren dalam konteks dinamika politik lokal menjadi pemimpin daerah sehingga muncul fenomena oligarki kekuasaan dan dinasti politik

---

<sup>9</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017); Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018); Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," *Jakarta: Salemba Humanika*, 2010.

<sup>10</sup> Nico J.G.Kaptein, "The Arab Middle East and Religious Authority," *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1170>.

dibeberapa pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jaringan Oligarki Kekuasaan dan Politik Dinasti beberapa Pondok Pesantren di Jawa antara lain:

1. *KH. Fuad Amin Imron*  
 pengasuh Ponpes Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan, juga sebagai mantan Bupati Bangkalan Madura Provinsi Jawa Timur, beliau berkuasa selama dua periode berturut-turut. Kemudian dilanjutkan putra laki-lakinya yang bernama Makmun Ibnu Fuad, beliau menjabat Bupati Bangkalan satu periode yakni tahun 2013-2018. Dan periode saat ini 2018-2023 yang meneruskan sebagai Bupati adalah Abdul Latif Amin adik kandung KH. Fuad Amin.
2. *Nyai Hj. Munjidah Wahab*  
 Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Jombang yang memenagkan pemilihan kepala daerah langsung Bupati Jombang Jawa Timur. Beliau mampu mengantarkan putra-putri dan menantunya menduduki kursi legislatif dari tingkat kabupaten Propinsi dan pusat, yakni; (1) Ahmad Silahuddin anak pertama, terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, (2) Emma Umiyatul Chusna anak kedua, terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi partai persatuan pembangunan, (3) Mujtahidur Ridho adalah menantu, yang terpilih menjadi anggota DPRD Jombang juga dari fraksi partai persatuan pembangunan.
3. *KH. Salwa Arifin*  
 Merupakan pengasuh Pondok pesantren Mambaul Ulum Bondowoso sekaligus Bupati Bondowoso 2019-2024. Sebelumnya menjabat sebagai wakil Bupati selama dua periode berturut-turut. Saat ini beliau berhasil membangun jaringan kekuasaan, dengan menampilkan putrinya Masyarafatul Manna pada pemilu legislative dan terpilih menjadi anggota DPRD tingkat II Kabupaten Bondowoso periode 2029-2024 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
4. *KH. Maimoen Zubair*  
 Ponpes Al Sarang – Rembang Jawa Tengah Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPPSarang – Jawa Tengah Anak Kandung Taj Yasin : Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, Majid Kamil: Ketua DPRD Rembang Jawa Tengah 2019-2024, Rajih Ubab Maimoen: DPR RI 2019-2024.
5. *KH. Thoyfoer*  
 Ponpes Al Hamidiyah Lasem Rembang Jawa Tengah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Partai PPP dan terpilih menjadi anggota DPRRI periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Lasem Rembang – Jawa Tengah. Mampu

mengantarkan putra kandungnya Arwani Thomafi menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan saat ini menjabat sebagai sekretaris umum pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan. Abdul Aziz adalah menantu, yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024).

Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa gurita kekuasaan di Bangkalan Madura Jawa Timur ini juga tergolong unik. Dialah RKH. Fuad Amin Imron merupakan cucu dari Syaichonah Kholil Bangkalan Kiai Kharismatik yang menjadi panutan warga NU di Indonesia, berhasil membangun raja -raja kecil. Dinasti politi Fuad amin menjadi contoh yang sangat penting setelah menjabat ketua DPRD kemudian menjadi Bupati Bangkalan selama dua periode, kemudian mengorbitkan anak kandungnya Makmun Ibnu Fuad menjadi Bupati selama satu periode 2013-2018. Dan jabatan Bupati yang sekarang dilanjutkan adik kandungnya yang bernama Abdul Latif Imron. RKH. Fuad Amin kemudian ditangkap Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi dan pencucian uang. Tepatnya tanggal 16 Agustus 2019 Fuad Amin meninggal disaat menjalani proses hukum.<sup>11</sup>

Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa gurita kekuasaan di Bangkalan Madura Jawa Timur ini juga tergolong unik. Dialah RKH. Fuad Amin Imron merupakan cucu dari Syaichonah Kholil Bangkalan Kiai Kharismatik yang menjadi panutan warga NU di Indonesia, berhasil membangun raja -raja kecil. Dinasti politi Fuad amin menjadi contoh yang sangat penting setelah menjabat ketua DPRD kemudian menjadi Bupati Bangkalan selama dua periode, kemudian mengorbitkan anak kandungnya Makmun Ibnu Fuad menjadi Bupati selama satu periode 2013-2018. Dan jabatan Bupati yang sekarang dilanjutkan adik kandungnya yang bernama Abdul Latif Imron. RKH. Fuad Amin kemudian ditangkap Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi dan pencucian uang. Tepatnya tanggal 16 Agustus 2019 Fuad Amin meninggal disaat menjalani proses hukum.<sup>12</sup>

Politik dinasti juga terlihat di kabupaten Jombang jaringan kekuasaan ibu kepada putra putrinya. Ibu Munjidah Wahab Bupati Jombang adalah putra

---

<sup>11</sup> Alim Bathoro, "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Fisip Umrah*, 2011; Yudhi Rachman, "Pilkada , Dinasti Politik Di Era Desentralisasi: Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik," in *Seminar Nasional Gender Dan Budaya Madura III*, 2014; M Armoyu and N Azizah, "Women's Strategy in Political Dynasty," 2020, 1-10, <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291703>.

<sup>12</sup> Bathoro, "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi"; Rachman, "Pilkada , Dinasti Politik Di Era Desentralisasi: Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik"; Armoyu and Azizah, "Women's Strategy in Political Dynasty."

kandung Kiai kharismatik salah satu pendiri NU dan Pahlawan Nasional yaitu KH. Wahab Hasbullah. Nama besar nyai Hj. Munjidah Wahab menjadi salah satu bukti bahwa beliau memiliki pengaruh sangat kuat terhadap keterpilihan anak anak kandung dan menantunya menjadi anggota legislative dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Jawa Timur hingga Anggota DPR/MPR RI. Kemenangan Munjidah wahab sebagai Bupati memberikan manfaat yang luas bagi keluarganya.

Pengaruh kepemimpinan munjidah wahab sebagai ketua Muslimat NU Cabang. Organisasi besar Nahdatul Ulama NU, Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU, IPNU, Banser Jombang mampu memberikan kontribusi suara pada pemilu legislatif sehingga putra putri, menantunya melenggangkang ke DPR/MPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang. Organisasi Masyarakat fatayat NU cabang. Pengaruh Kultural dan Nama besar KH. Wahab Hasbullah menjadi factor pendukung dalam meraup suara pemilih warga Nahdhiyin di wilayah Jombang dan Kabupaten/Kota Mojokerto. Patronase antara kyai, bunyai pesantren alumni dan simpatisan pesantren juga menjadi penentu keberhasilan dan kemenangan. Seperti yang di sampaikan oleh Emma Putri Bupati Jombang bertutur bahwa

....” Untuk menjaga supaya suara pemilih para santri, alumni dan simpatisan pesantren semakin solid dan besar kami menunjuk ketua Tim Sukses berasal dari keluarga Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Sehingga memudahkan koordinasi antar keluarga pesantren, karena semua pesantren besar di Jombang ini masih ada pertalian persaudaraan dengan kami, inilah yang menjadi salah satu faktor ibu, kakak dan adik, menantunya, berhasil memenangkan pemilu legislative ini, doakan ya semoga jabatan ini membawa berkah. (wawancara dengan Emma) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2020 di Kantor WPP PPP di Kendang Sari Surabaya)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada nama besar keluarga pondok pesantren berpengaruh sangat kuat dan menjadi penentu kemenangan kandidasi pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif. Jaringan politik keluarga juga terbangun di Kabupaten Bondowoso, KH. Salwa Arifin adalah Bupati masa periode 2019-2024 juga sebagai ketua pimpinan cabang nahdlatul ulama (NU), sekaligus sebagai pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bondowoso. Sehingga mudah mengarahkan masyarakat untuk patuh dan memilihnya saat pemilukada. Pun juga pada saat pemilu legislative, KH. Salwa mampu mengantarkan putri pertamanya Masyarafatul Manna menjadi anggota DPRD Bondowoso periode 2029-2024. Upaya membangun kerajaan politik keluarga juga terjadi di Lasem Rembang di Jawa Tengah. Dari kedua kiai besar KH. Maimun Zubair dan KH. Ahmad Thoyfoer. Dari ikatan keluarga besar pondok pesantren

mampu memberikan pengaruh terhadap keterpilihan putra putranya dikancah politik baik di jajaran legislatif maupun sebagai kepala daerah. Relasi kekeberabatan memang sering terjadi di struktur partai politik dan ini menjadi fenomena di Indonesia.

### **Politik Kekeberabatan Pesantren dan Oligarki Kekuasaan**

Keikutsertaan keluarga pesantren dalam kancah dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala daerah langsung, sebagai usaha membangun jaringan kekuasaan dan dinsti politik untuk melanggenkan kekuasaan. Seperti yang dijelaskan Mendoza dan Venida bahwa politik kekeluargaan sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, dan jaringan tersebut mampu menyatukan jaringan yang ada sebelumnya sehingga terbentuk menjadi mekanisme kekuasaan baru dan mempertahankan kekuasaan itu.<sup>13</sup> Meningkatnya relasi patron - klien dan eksistensi elit pondok pesantren dalam membangun jaringan kekuasaan oligarki pada dinasti politik, upaya memanfaatkan cultural capital meraih kemenangan.<sup>14</sup> Dengan membawa nama besar keluarga seperti KH. Maimun Zubair di Rembang, KH. Wahab Hasbullah di Jombang, KH. Syaichona Kholil di Bangkalan, KH. Salwa Arifin di Bondowoso. Implikasi dari dinasti politik menjamurnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti yang terjadi di kabupaten Jombang bu Munjidah juga terendus melakukan hal yang sama menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye putra putrinya. Seperti yang dikatakan oleh Fatimatus Zahra anggota DPRD kabupaten Jombang periode 2019-2024;

“.....bu Bupati itu manggil semua kepala dinas di lingkungan pemkab Jombang, mereka itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan suara untuk anak-anaknya yang nyalon anggota legislatif pusat, propinsi dan daerah. Sampai-sampai ada lho kepala dinas itu ngomong kalau sudah habis berpuluh-puluh juta untuk dibagi-bagi kemasayarakat baik berupa beras, gula, minyak dll. “ (hasil wawancara dengan Fatimatus Zahra, Jombang 21 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat dengan jelas bahwa ada power elit dalam konteks dinamika kekuasaan lokal untuk membangun jaringan politik

---

<sup>13</sup> Ronald U. Mendoza et al., “Political Dynasties and Poverty: Measurement and Evidence of Linkages in the Philippines,” *Oxford Development Studies*, 2016, <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>.

<sup>14</sup> Nurul Azizah, Joseph Okwesili Nkwede, and Mohammad Armoyu, “The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics,” 2021, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.

keluarga untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan politik ekonomi komersil individual.

### Relasi Elit Pesantren dalam Jaringan Kuasa

Kekuatan elit dalam jaringan merupakan hubungan antara tiga kelompok yakni; politik, militer dan ekonomi merupakan penentu terhadap kebijakan –kebijakan penting. Power elite theory ini adalah hasil temuan penelitian Larsen and Sovacool.<sup>15</sup> Patron – klien : dalam teori patron-klien scott membeikan pemaparan bahwa relasi keterikatan dan ketidakberdayaan klien terhadap kuasa patronase sehingga hubungan tersebut menjadi abadi karena ketidakmampuan klien melepaskan diri dari kondisi yang ada.<sup>16</sup> Dalam hal yang berkaitan dengan pilkada, ada transaksi politik oleh elit agama dianggap sebagai hal yang lumrah dan netral meskipun kiai menggunakan nilai – nilai agama untuk menghegemoni masyarakat secara masif.

Sesungguhnya apa yang dilakukan elit pesantren tersebut didasari prinsip materialistik dalam relasi kuasa.<sup>17</sup> Tradisi habitus masyarakat di daerah religius, kepatuhan, memberikan penghormatan secara khidmat kepada kiai dan anak keturunannya menjadi sebuah keharusan terutama bagi santri pondok pesantren,<sup>18</sup> terdapat point utama bahwa agama menjadi faktor pemersatu masyarakat Madura dan didaerah yang terdapat banyak pondok pesantren besar seperti Rembang Jawa Tengah KH Maimun Zubair, KH. Toyfur Lasem Rembang, Di Jawa Timur antara lain, Jombang, Madura, Bondowoso dan daerah tapal kuda.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Anton Grau Larsen and Christoph Houman Ellersgaard, “Identifying Power Elites–k-Cores in Heterogeneous Affiliation Networks,” *Social Networks* 50 (2017): 55–69, <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.009>; Benjamin K. Sovacool and Marie Claire Brisbois, “Elite Power in Low-Carbon Transitions: A Critical and Interdisciplinary Review,” *Energy Research and Social Science* 57, no. December 2018 (2019): 101242, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101242>.

<sup>16</sup> Carl H. Landé, “Political Clientelism in Political Studies:Retrospect and Prospects,” *International Political Science Review* 4, no. 4 (1983), <https://doi.org/10.1177/019251218300400403>.

<sup>17</sup> Muhammad Adlin Sila, “Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura,” *Studia Islamika*, 2019, <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.11121>.

<sup>18</sup> Muhammad As’ad, “Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy’ari Menjadi Ketua Masyumi,” *Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 95–115, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656>.

<sup>19</sup> Nur Faizin, “Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pada PEMILUKADA Di Kabupaten Sumenep Tahun 2010,” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2017, <https://doi.org/10.14421/jsr.v1i12.1352>.

### Dominasi Elit Agama Memobilisasi Gerakan Massa

Relasi kuasa tidak bisa lepas dari peran aktor yang paling berkuasa seperti dominasi elite agama atau kiai. Hal yang juga terjadi di beberapa tempat di pulau Jawa dimana dominasi kiai sangat kuat untuk membangun oligarki kekuasaan politik dinasti. Jaringan kuasa elit pondok pesantren semakin meluas seiring diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung (pilkada).<sup>20</sup> Elit pesantren mampu mempengaruhi dan memobilisasi gerakan massa, kharisma yang dimilikinya sangat tinggi sehingga menjadi tempat konsultasi, pengambilan keputusan - keputusan penting, mampu menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, selain sebagai Bupati KH. Salwa Arifin juga sebagai ketua pimpinan cabang nahdlatul ulama (NU), sekaligus sebagai pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bondowoso. Sehingga mudah mengarahkan masyarakat untuk patuh dan memilihnya saat pemilu. Pun juga pada saat pemilu legislatif, KH. Salwa mampu mengantarkan putri pertamanya Masyarafatul Manna menjadi anggota DPRD Bondowoso periode 2023-2028.<sup>21</sup>

### Kesimpulan

Tulisan ini mengungkap bahwa beberapa temuan penting terkait dengan oligarki kekuasaan dan jaringan pondok pesantren dalam dinasti politik lokal yang pertama, salah satu upaya melanggengkan kekuasaan berorientasi materialis mengesampingkan nilai - nilai spriritual. Terbukti banyak kasus korupsi, pencucian uang dan memanfaatkan anggaran untuk kepentingan kampanye yang dilakukan oleh elit pesantren seperti KH. Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan Jawa Timur tidak hanya ditangkap dan ditahan oleh KPK tetapi yang lebih tragis beliau meninggal dunia disaat menjalani proses hukum yang berlangsung.

Kedua, memanfaatkan relasi patron - klien dan cultural capital untuk meraih kemenangan pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif. Patron elit pesantren mampu memobilisasi gerakan massa sehingga mudah mengarahkan meraih suara pemilih saat pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif. Praktek politik dinasti menjadikan hegemoni dan patron klien menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Menggunakan nilai-nilai religi untuk menggalang kekuatan politik

---

<sup>20</sup> Chalik, "Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur"; Mohammad Kosim, "Kyai dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)," *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 149-60; Azizah, Okwesili Nkwede, and Armoyu, "The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics."

<sup>21</sup> Afdolu Nasikhin and M. Turhan Yani, "Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi politik Santri di PP. Al-Ishlah prambon Tergayang Soko Tuban," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2014; Syamsul Rijal, "Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren," *Tadris Volume*, 2014; Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

berspektif materialistik ekonomis .secara laten. Hal ini juga terjadi di Jombang, Bangkalan, Bondowoso, dan Rembang.

Kajian ini membahas tentang oligarki kekuasaan dan politik dinasti pondok pesantren diranah politik lokal. Oleh karena itu menyarankan bagi elit agama dalam lingkaran dinasti politik diharapkan bisa membuktikan hasil kerja profesional bukan semata mata memanfaatkan nama besar keluarga pesantren. Seyogyanya menunjukkan hasil jerih payahnya sendiri untuk menjadi kontestan dalam politik lokal, bukan semata-mata mengandalkan orang tua dan kerabat keluarganya.

### Referensi

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Armoyu, M, and N Azizah. "Women's Strategy in Political Dynasty," 2020, 1-10. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291703>.
- As'ad, Muhammad. "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analaisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi." *Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 95-115. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656>.
- Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azizah, Nurul, Joseph Okwesili Nkwede, and Mohammad Armoyu. "The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics," 2021. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.
- Bathoro, Alim. "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal FISIP UMRAH*, 2011.
- Chalik, Abdul. "Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 364. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>.
- Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2015. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>.
- Faizin, Nur. "Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pada Pemilu pada Di Kabupaten Sumenep Tahun 2010." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2017. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1352>.
- Grau, Anton, and Christoph Houman. "Identifying Power Elites – k-Cores in Heterogeneous Affiliation Networks." *Social Networks* 50 (2017): 55-69. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.009>.
- Grusky, David, and C. Wright Mills. "The Power Elite." In *Inequality in the 21st Century*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429499821-16>.

- Harjanto, S. "Pemilu, Politik Patronase Dan Ideologi Parpol." *None* 1, no. 2 (2012): 81–102. <https://doi.org/10.33558/akp.v1i2.593>.
- Hasan, Nor. "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 260. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>.
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial." *Jakarta: Salemba Humanika*, 2010.
- Kosim, Mohammad. "Kyai dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)." *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 149–60.
- Landé, Carl H. "Political Clientelism in Political Studies: Retrospect and Prospects." *International Political Science Review* 4, no. 4 (1983). <https://doi.org/10.1177/019251218300400403>.
- Larsen, Anton Grau, and Christoph Houman Ellersgaard. "Identifying Power Elites—k-Cores in Heterogeneous Affiliation Networks." *Social Networks* 50 (2017): 55–69. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.009>.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Membaca Konteks Dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan Charles Wright Mills and the Power Elite Theory: Reading the Context and Mapping the Political Sociology Theory About the Class of Elite Power." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no. 2 (2019): 73–83.
- Mendoza, Ronald U., Edsel L. Beja, Victor S. Venida, and David B. Yap. "Political Dynasties and Poverty: Measurement and Evidence of Linkages in the Philippines." *Oxford Development Studies*, 2016. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>.
- Muslim, Asep, Lala M Kolopaking, Arya H Dharmawan, and Endriatmo Soetarto. "Dinamika Peran Sosial Politik Ulama Dan Jawara Di Pandeglang Banten." *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 461. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>.
- Nasikhin, Afdolu, and M. Turhan Yani. "Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP. Al-Ishlah Prambon Tergayang Soko Tuban." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2014.
- Nico J.G.Kaptein. "The Arab Middle East and Religious Authority." *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1170>.
- Rachman, Yudhi. "Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi: Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik." In *Seminar Nasional Gender Dan Budaya Madura III*, 2014.
- Rijal, Syamsul. "Peran Politik Kiai Dalam Dalam Pendidikan Pesantren." *Tadrīs Volume*, 2014.

- Roniger, Luis. "Patron-Client Relations, Social and Anthropological Study Of." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12125-7>.
- Scott, James C. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies*, 1972. <https://doi.org/10.2307/2053176>.
- Sila, Muhammad Adlin. "Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura." *Studia Islamika*, 2019. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.11121>.
- Sovacool, Benjamin K., and Marie Claire Brisbois. "Elite Power in Low-Carbon Transitions: A Critical and Interdisciplinary Review." *Energy Research and Social Science* 57, no. December 2018 (2019): 101242. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101242>.
- Sutisna, Agus. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2017. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>.
- Zamroni, M. Imam. "Agama, Etnis dan Politik Dalam Panggung Kekuasaan: Dinamika Politik Tauke Dan Kiai Di Madura." *El-Harakah (terakreditasi)* 10, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.18860/el.v10i1.4596>.